



JOGJA KITA
Rusunawa di Bener, Tegalrejo Sudah Selesai Pembangunannya

Tiga Lantai untuk MBR, Menunggu Serah Terima

Kota Jogja akan memiliki satu lagi rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Itu setelah pembangunan rusunawa di Bener, Tegalrejo tinggal menunggu proses serah terima atau *Pre Hand Over* (PHO).

SAMBIL menunggu proses serah terima dari pemerintah pusat, Pemkot Jogja, melalui unit pelaksana teknis (UPT) Rusunawa, juga tengah menyusun peraturan wali kota (Perwal) terkait dengan pengisian penghuni dan retribusi.

Penyusunan perwal itu dikarenakan ada perbedaan pada sisi tipe bangunannya. Berbeda dengan rumah susun lain atau sebelumnya, yakni saat ini dengan tipe 3x6 meter lebih luas dibandingkan rumah susun yang lain dengan tipe 2x1 meter maupun 1x8 meter. Dengan demikian dipastikan akan ada perbedaan kelas di Rusunawa Bener ini. "Dan ini fasilitasnya pasti juga akan berbeda, ketika masuk nanti mabeler-nya sudah ada," ujar Kepala Bidang Perumahan Pemukiman dan Tata Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) kota Jogja, Sigit Setiawan beberapa waktu lalu.

Warga yang berhak maupun bisa memanfaatkan fasilitas Rusunawa tersebut harus menyewa atau ada batas penghunian selama tiga tahun. Setelah itu bisa diperpanjang kembali yang memenuhi syarat.

Sedangkan UPT Rusunawa akan mengelola secara penuh setelah adanya serah



SUDAH JADI: Pengendara motor melintas di depan Rusunawa Bener, Tegalrejo yang sudah selesai dibangun. Pemkot Jogja tinggal menunggu proses serah terimanya.

terima aset bangunan tersebut yang melibatkan pemerintah pusat. Namun demikian, nanti dari pihak Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan telah berkomunikasi dengan DPUPKP terkait dengan pemkot akan mengirimkan surat untuk penghunian sementara. Artinya adalah sebelum adanya serah terima aset bangunan tersebut rumah susun itu sudah bisa dihuni oleh warga.

Gambaran dia, akan dibentuk semacam Badan Pengelola yang bertugas mengkoordinir para penghuni rusunawa sebelum diserahkan kepada UPT Rusunawa. "Bukan terus kemudian dihuni lalu nanti tidak dihuni, tapi kalau tidak dihuni kan nanti tetap akan rusak bangunan itu," jelasnya.

Adapun gambaran untuk para penghuninya adalah masyarakat berpenghasilan

**Bukan terus kemudian
dihuni lalu nanti tidak dihuni,
tapi kalau tidak dihuni kan
nanti tetap akan rusak
bangunan itu."**

SIGIT SETIAWAN

*Kabid Perumahan Pemukiman dan
Tata Bangunan, DPUPKP kota Jogja,*

rendah (MBR) yang bukan golongan miskin. Melainkan mereka yang berpenghasilan tetapi belum mampu membeli rumah. "Semoga gambaran kami di akhir Januari 2020 sudah ada proses seleksi (MBR)," bebernya.

Sigit mengatakan, proses serah terima PHO harus melibatkan pemerintah pusat karena nilai bangunan tersebut lebih dari Rp 20 miliar. Namun kondisi secara fisik bangunan sudah mencapai 100 persen. "Ini tidak hanya diranah kami (PU) dengan pemkot saja. Tapi melibatkan pemerintah pusat jadi prosesnya cukup lama," kata Sigit.

Sigit menambahkan, jika sudah adanya serah terima kepada UPT Rusunawa akan sepenuhnya bisa mengganggu pemeliharaan dan sebagainya. Maka pada saat pemeliharaan nanti secara otomatis bisa dilakukan oleh UPT misalnya ada lampu mati maupun keran bocor dan lain-lain. Saat ini UPT belum bisa mengganggu pemeliharaan karena aset bangunan belum masuk ke kota. "Selama pemeliharaan ini kan asetnya tetap masih miliknya pusat," paparnya.

Karena itu, tanggung jawab pemeliharaan hanya 180 hari dari penyedia tersebut atau sekitar enam bulan. Sembari menunggu proses surat serah terima dikelola oleh Badan Pengelola. Pun jika setelah lebih dari 180 hari ada kerusakan maka tanggungjawab pemeliharaan adalah dari iurannya yang dikelola oleh badan pengelola. "Iurannya itu nanti untuk pemeliharaan misal lampu mati atau keran bocor," tuturnya.

Kapasitas rumah susun MBR ini untuk 42 unit kamar. Dengan bangunan tiga lantai, 10 unit kamar di lantai satu akan diisi fasilitas mushola dan serbaguna serta untuk kegiatan usaha ekonomi. Adapun 2-3 lantai ke atas terdapat 16 unit kamar seluruhnya. Fasilitas yaitu tempat tidur, meja, kursi, dan almari.

Perwakilan UPT Rusunawa, Hanif mengatakan saat ini masih tahap proses penyusunan perwal untuk penempatan rusunawa. "Ini sedang dibahas oleh tim lintas sektor untuk menyusun perwal tentang tarif dan tim seleksi penerimaannya," kata Hanif.

Hanif mengatakan untuk aturan tarif rusun ada aturan khusus pada perwal tersebut. Karena tipe rusunawa kali ini berbeda dengan rumah susun yang lain. Sehingga adanya kemungkinan banyaknya pertimbangan dalam menyusunnya. Namun dia membeberkan kriteria bagi MBR yang harus menempati rusun tersebut bagi mereka yang berpendapatan paling tidak UMR berkisar Rp 1 juta - Rp 2 juta. "Yang umum cuma itu, KTP harus warga kota. Prosesnya kemungkinan juga masih lama," imbuhnya. (**/cr15/pral/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005